



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG	: EKSEKUTIF		
LEMBAGA	: BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)		
UNIT KERJA	: SEKRETARIAT UTAMA		
I. DATA PRIBADI			
1. Nama	: MOH. BAROKNA HAULAH		
2. Jabatan	: KEPALA BIRO PERENCANAAN		
3. NHK	: 192861		
II. DATA HARTA			
A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	1.400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/58 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI			Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI			Rp. 1.100.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	137.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI			Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2013, HASIL SENDIRI			Rp. 130.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	6.550.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	42.906.243
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	1.586.456.243
III. HUTANG		Rp.	120.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.466.456.243

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.